
MEMBANGUN OPINI PUBLIK TERHADAP PARTAI POLITIK (Studi Kasus Pilkada Jabar 2018)

Hanafi

Ilmu Komunikasi Fakultas Komunikasi dan Desain

Email : hanafi256@unibi.ac.id

ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan untuk menemukan, mengetahui berbagai data dan informasi mengenai opini publik terhadap parpol di Pilkada Jabar 2018, sehingga dengannya ditemukan dan diperoleh gambaran mengenai format opini publik, khususnya opini politik publik di Jabar.

Adapun dalam penelitian ini diperoleh hasil antara lain: pertama, isi/substansi pokok format opini publik di Pilkada 2018, berkisar tentang urusan pokok yang membumi dan sesuai jatidiri dan karakteristik Jawa Barat. Kedua, periodisasi pelaksanaan, secara garis besar berisikan tiga (3) tahapan, yaitu tahap I, II, dan III. Tahapan ini untuk mengukur keterkaitan kuat antara profil, prestasi, kompetensi parpol dimata publik Jawa Barat; konsistensi dengan perencanaan program dan kebijakan yang dirancang parpol; dan menguji kemampuan parpol dalam membawa nilai *potitioning* dan harkat Jawa Barat di tingkat nasional bahkan internasional. Ketiga, kemasan dan *setting*, opini publik layak untuk diukur sesuai batasan-batasan nilai budaya lokal, nilai etis kedaerahan serta kearifan lokal yang senantiasa diwariskan secara turun-temurun di tengah masyarakat pasundan yang religius.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskripsi terhadap konsep dan teori, produk perundangan, serta isi pemberitaan media yang beredar terkait focus permasalahan yang dikaji.

Kata kunci : Opini Publik, Partai Politik, Pilkada

ABSTRACT

This paper aims to find out, find out various data and information about public opinion on political parties in the 2018 West Java regional election, so that it can be found and obtained an overview of the format of public opinion, especially public political opinion in Jabar. The results of this study include: first, the main content / substance of the public opinion format in the 2018 regional election, revolves around the main affairs that are grounded and in accordance with the identity and characteristics of West Java. Second, the periodization of implementation, in outline contains three (3) stages, namely stages I, II, and III. This stage is to measure the strong linkages between profiles, achievements, political party competencies in the eyes of the West Java public; consistency with program planning and policies designed by political parties; and test the ability of political parties to bring the value and value of West Java at the national and even international levels. Third, packaging and setting, public opinion is feasible to be measured according to the boundaries of local cultural values, regional ethical values and local wisdom which are always inherited from generation to generation in the midst of religious pasundan communities. This study uses a qualitative method with a description approach to concepts and theories, product legislation, and the content of news media circulating related to the focus of the problems being studied

Keywords: Public Opinion, Political Parties, Election

1. PENDAHULUAN

Pesta Demokrasi Politik masyarakat Jawa Barat dalam hal ini pemilihan Kepala Daerah tinggal tersisa kurang dari satu setengah tahun ke depan. Pesta demokrasi untuk memilih para elit nomor satu daerah (Gubernur dan Bupati/Walikota) se Jawa Barat periode 2018 – 2023 ini, akan berlangsung pada sekitar pertengahan Tahun 2018 mendatang. Terkait khususnya Pemilihan Gubernur Jawa Barat 2018 (selanjutnya disebut Pilgub Jabar 2018) akan dilaksanakan pada Juni 2018. Ini merupakan pemilihan Kepada Daerah ketiga bagi Jawa Barat yang dilakukan secara langsung menggunakan sistem pencoblosan oleh seluruh warga Jabar yang berhak memberikan suara. Jadwal pemilihan periode ini dimundurkan dari periode sebelumnya karena mengikuti jadwal Pilkada serentak gelombang ketiga pada Juni 2018. Pihak KPUD Jawa Barat sebagai penyelenggara tentunya mengeluarkan jadwal definitif mengenai tahapan Pilkada tersebut. Berdasarkan peraturan, hanya partai politik yang memiliki 20 kursi atau lebih di DPRD Jawa Barat yang dapat mengajukan kandidat. Partai politik yang memiliki kursi kurang dari ketentuan di atas, dapat mengajukan calon hanya jika mereka telah memperoleh dukungan dari partai politik lainnya.

Pilgub Jabar 2018 dinilai umum menjadi pagelaran politik penting kedua di Indonesia setelah Pilgub DKI Jakarta. Betapa tidak jika yang akan digelar nanti adalah pemilihan Kepala Daerah di wilayah Propinsi yang dipahami merupakan wilayah yang langsung berbatasan dengan wilayah ibukota negara, Jakarta. Kenyataan ini langsung atau tidak langsung secara geopolitik dan geostrategis, dapat menjadikan peristiwa politik yang menjadi model kedua setelah Pilgub DKI Jakarta, sebagai barometer penting dalam mengukur stabilitas dan dinamika komunikasi politik tingkat nasional di Indonesia. Keberlangsungan Pilkada Jabar 2018 sebagai sebuah peristiwa politik kewilayahan dalam kerangka Negara Kesatuan RI merupakan realitas politik strategis bagi Jawa Barat. Hal ini mengingat bahwa situasi dan kondisi Propinsi Jabar dari sisi geografis, latar belakang sejarah, dan dinamika sosio-politiknya memiliki beberapa kekhasan. Seperti telah disinggung sebelumnya, secara geopolitik dan geostrategis, Propinsi Jabar langsung berbatasan dengan wilayah ibukota negara yakni Propinsi DKI Jakarta. Kenyataan

ini membawa akibat kedinamisan tersendiri yang berdampak luas di berbagai bidang kehidupan politik, ekonomi dan sosial budaya. Kondisi ini mendorong keterkaitan yang signifikan bagi konstalasi politik Jawa Barat di tengah konstelasi politik nasional. Sebagaimana dapat dilihat dan dirasakan dalam kehidupan dan dinamika sosial politik masyarakat Jabar, terutama sejak reformasi bergulir hampir dua dekade ini.

Berbagai ulasan, liputan sampai diskusi publik, mulai menghangat dan aktif dikemas dalam kerangka ikut menyoroti ajang perpolitikan Jabar 2018 ini. Wacana pokok di samping terkait dengan nama-nama yang diperkirakan akan tampil sebagai kontestan Pilkada, secara khusus Pilgub Jabar, termasuk di dalamnya juga menyoroti dan menganalisis seputar isu, strategi, kiat, dan aktivitas parpol-parpol pendukung dalam mengusung calon-calon yang mereka jagokan. Fenomena ini misalnya, seperti dirilis oleh beberapa lembaga seperti Pusat Kajian Komunikasi Politik Indonesia (PKKPI), dan Citra Survei Indonesia (CSI), yang laporannya menyebutkan beberapa figur yang mereka anggap kuat dan akan masuk ke bursa bakal calon gubernur Jawa Barat periode 2018-2023. Dalam Pilkada Jawa Barat 2018, PKKPI dan CSI mencatat sejumlah nama dan ada nama kuat dalam calon tersebut. Rilis PKKPI dan CSI ini adalah hanya pantauan, belum hasil survei," kata analis dan pengamat politik dari PKKPI, Munanto dalam siaran persnya di Jakarta. Figur seperti Deddy Mizwar (Wagub Jabar aktif), Deddy Mulyadi (Bupati Purwakarta aktif), Dede Yusuf (anggota DPR RI dan mantan Wagub Jabar), Desi Ratnasari (artis dan politisi), Iwa Katiwa (Sekda Propinsi Jabar), Nurul Arifin (artis dan anggota DPR RI, kader Partai Golkar), Netty Herawaty (istri Gubernur Jabar, Aher), Ridwan Kamil (Walikota Bandung aktif), Rieke Dyah Pitaloka (artis dan anggota DPR RI, kader PDI-P), mulai muncul di permukaan. Tentu saja nama-nama ini secara formal masih harus melalui berbagai tahapan dan seleksi politik yang cukup panjang, sebelum saatnya nanti dikukuhkan secara resmi oleh KPUD Jabar.

Ulasan lainnya menyongsong berlangsungnya Pilkada Jabar 2018, muncul dari pemberitaan "AntaraNews", menyangkut para calon gubernur Jabar misalnya, sejumlah informasi media melaporkan bahwa, Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar,

menyatakan sudah mendapat dukungan dari Partai Gerindra untuk maju dalam Pemilihan Gubernur Jawa Barat 2018 mendatang. Dukungan itu ia dapat saat menghadiri Rapat Pimpinan Daerah (Rapimda) Partai Gerindra Jawa Barat, di Sentul, Kabupaten Bogor, Senin (1/5/2017) malam lalu. Ia hadir mewakili Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan pada acara tersebut. "Tiba-tiba dari Rapimda tadi seluruh DPC dan DPD beri dukungan ke saya," kata Deddy, saat dihubungi.. Namun kata Deddy, dukungan yang diberikan itu belum resmi menjadi sikap partai. Karena menurutnya masih harus dibahas lagi. "Keputusan di Ketua Umum. Tadi ngobrol sama Ketua Umum (Prabowo) enggak ada masalah, tinggal nunggu waktu saja," kata dia. Menurut Deddy, pihaknya sangat menyambut baik dukungan yang diberikan Partai Gerindra tersebut. "Alhamdulillah kalau emang (dukungan) ini hak kita, mudah-mudahan dikasi kemudahan jalannya. Yang penting bersama-sama dengan partai ada koalisi dan punya tujuan yang sama," katanya. Apalagi menurutnya Partai Gerindra tidak memberikan syarat apapun untuk mau diusung oleh Partai Gerindra. Yang penting bisa berbuat untuk kemajuan Jawa Barat. "Enggak ada syarat satu, dua, tiga. Yang penting bisa berbuat untuk Jawa Barat," ujarnya. Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Organisasi, Kader dan Keanggotaan DPD Partai Gerindra Jawa Barat Bucky Wikagoe membenarkan adanya dukungan terhadap Deddy Mizwar. Namun bukan sikap resmi dari Partai Gerindra. Pasalnya dari hasil Rapimda DPD Partai Gerindra Jabar Senin lalu, secara bulat Partai Gerindra mendukung Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Barat Mulyadi maju di Pilgub Jabar 2018 menjadi calon gubernur atau calon wakil gubernur. "Saat itu spontan peserta rapimda mengutarakan dukungan agar Pak Demiz (Deddy Mizwar) bisa berpasangan dengan Pak Mulyadi yang bulat diusung calon gubernur atau wakil gubernur di Pilgub Jabar 2018 oleh Partai Gerindra," ujarnya.

Terkait wacana mengenai para calon lainnya muncul dari analis dan pengamat politik dari PKKPI, Munanto. Ia mengatakan bahwa, Pilkada Jabar meskipun masih dari satahun lagi, tetapi pesta demokrasi di provinsi itu dipastikan akan ramai setelah Pilkada DKI Jakarta. Ia menyatakan bahwa ada politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) TB. Hasanudin mempunyai karakter kuat, tegas, dan

berani. "Betul banyak tokoh di Jabar, tetapi saya lihat nama TB Hasanudin sudah dikenal, saya lihat juga dia tegas. Cuma apa dia akan dipilih Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri atau tidak pada 2018 nanti? Kalau saya melihat dia memang sudah teruji dan paham masalah polhukam selain saat ini dia duduk di Komisi I DPR RI dan harus dicatat dia juga vokal mengenai kebenaran," tuturnya. Lebih lanjut, menurut Munanto yang jelas Pilkada Jabar berbeda dengan DKI Jakarta karena di Jabar harus menggunakan strategi kampanye yang membumi. "Selain luas wilayah, Jabar unik dalam pilkada. Kita dapat belajar banyak dari munculnya nama Ahmad Heryawan (Aher) yang pada awal-awal 'kan tak disangka, tetapi bisa mengalahkan yang lain, hanya karena dalam jabatan periode pertamanya menggandeng artis Dede Yusuf atau pada saat maju untuk jabatan kedua kali, Aher juga muncul dan menang lagi karena menggandeng Deddy Mizwar," tuturnya.

Mengenai teknis pelaksanaan Pilkada Jabar 2018, pihak penyelenggara dalam hal ini KPUD Jabar, menyiapkan dan menyusun agenda dan tahapan Pilkada sesuai peraturan perundangan yang berlaku. sebagaimana yang diamanahkan dalam UU No. 8 tahun 2015 Tentang Pilkada. Sebagai amanat konstitusi dan tugas profesionalnya sebagai lembaga independen, Pilkada Jabar 2018 selayaknya diselenggarakan oleh KPUD Jabar untuk menghasilkan para kepala daerah secara demokratis, konstitusional, taat azas semata demi kemajuan Jawa Barat. Hal yang penting di tahapan awal Pilkada salah satunya adalah memperkenalkan dan menampilkan sosok para calon yang akan berlaga nanti di hadapan publik Jawa Barat secara transparan. Langkah ke arah ini bisa secara sistemik diawali dengan tahapan pengumuman resmi para calon, kampanye dan debat terbuka, maupun uji publik lainnya. Untuk memenuhi tujuan inilah dibutuhkan sebuah konsep yang aplikatif sebagai format konstruktif dalam pagelaran kampanye debat terbuka pada Pilkada Jabar 2018. Melalui sarana kampanye debat terbuka inilah, unjuk kompetensi serta kelayakan diri para calon, secara terbuka dapat digelar. Untuk itu dibutuhkan sebuah format konstruktif dalam kampanye debat terbuka para calon kepala daerah yang selanjutnya akan diuraikan dalam bagian berikutnya dari makalah ini.

2. TINJAUAN TEORI

Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia, pada dasarnya merupakan sebuah proses politik demokratis yang melibatkan partisipasi masyarakat di daerah. Wujud pelaksanaannya tak lain dikenal dengan istilah pemilihan umum atau “*the election*” (Budiardjo, 1986). Pilkada ini dilakukan oleh seluruh warga masyarakat daerah sebagai pemilih sesuai persyaratan yang ditentukan, dengan tujuan untuk memilih para kepala daerah dengan cara mencoblos/mencontreng foto salah satu kontestan (UU No. 8 tahun 2015 Tentang Pilkada serta Juklak/Juknis KPU, Pilkada, 2013). Proses Pilkada, sebagaimana halnya proses pemilu lain pada umumnya, melalui tahap sosialisasi dan pengenalan para calon yang di kenal dengan kampanye. Kampanye sebagai ajang mempererat hubungan dan keterkaitan politis antara para calon kontestan dengan masyarakat pemilih, melalui pengenalan profil, visi misi dan program yang ditawarkannya (Budiardjo dan Isjwara, 1988).

Terkait khusus Pilkada Jabar 2018, KPU menetapkan 16 kabupaten/kota ikut sebagai peserta Pilkada Jabar yang digelar serentak pada tahun 2018. Pelaksanaan Pilkada serentak di 16 kabupaten/kota di Jabar juga bersamaan dengan digelarnya Pemilihan Gubernur Jabar pada tahun itu. Berdasarkan data ada 13 kabupaten/kota yang akhir masa jabatan (AMJ) habis pada tahun 2018. Dan 4 kabupaten/kota yang dimajukan Pilkada nya meski AMJ berakhir pada 2019 nanti. Pilkada Jabar 2018 juga bersamaan dengan Pilkada serentak di seluruh Indonesia. Kepala daerah yang masa jabatannya habis di tahun 2018 lebih dominan di Pilkada serentak 2018 di Jabar. Pilkada Jabar 2018 diagendakan akan digelar pada bulan Juni tahun 2018. Sebagaimana Pilkada lainnya, beberapa kebijakan KPU terkait Daftar Pemilih Tetap (DPT) akan disamakan dengan DPT yang nanti digunakan pada Pilgub Jabar 2018. Tahapan Pilkada Jabar 2018 dilakukan secara bersamaan di 16 kabupaten/kota di Jabar (detikNews, reportase berita, 2016)

Di Pilkada Jabar 2018 KPU menggunakan mekanisme pemilihan yang dilakukan hanya satu putaran. Artinya pemenang suara terbanyak akan langsung dinyatakan lolos sebagai pemenang Pilkada. Di sisi lain informasi terbaru di Pilkada serentak 2018 juga KPU tidak menetapkan batasan perolehan suara yang mengakibatkan pemilihan diputar dua kali, artinya tidak ada batasan minimal dimana pasangan calon dapat dinyatakan ikut di putaran berikutnya karena tidak ada putaran kedua. Pasangan calon yang memperoleh suara terbanyaklah yang nanti ditetapkan sebagai pemenang. Di sisi lain KPU juga mengatur tentang mekanisme sosialisasi pasangan calon yang maju di Pilkada, dimana seluruh biaya sosialisasi ditanggung oleh pemerintah melalui KPU. Misalnya saja untuk biaya atribut dan juga sosialisasi pasangan calon. Namun demikian pasangan calon tetap mendapatkan kesempatan untuk bersosialisasi sebagaimana jadwal tahapan Pilkada serentak tahun 2018. Penghematan anggaran pemilu di Pilkada serentak tahun 2018 dengan memanfaatkan DPT bersama yang itu juga digunakan pada Pilgub Jabar 2018. Artinya kemungkinan untuk biaya pemutakhiran data dapat diminimalisir dan menekan biaya pengeluaran pemerintah. Peserta Pilkada Jabar tahun 2018 jumlahnya lebih banyak ketimbang Pilkada Jabar di tahun 2017 yang hanya diikuti oleh tiga kabupaten/kota yaitu, Kota Cimahi, Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Bekasi. Berikut ini daftar kabupaten/kota peserta Pilkada Jabar 2018: 1. Kota Bandung, 2. Kota Bogor (AMJ 2019), 3. Kota Cirebon, 4. Kota Sukabumi, 5. Kota Banjar, 6. Kota Bekasi, 7. Kabupaten Bogor, 8. Kabupaten Purwakarta, 9. Kabupaten Sumedang, 10. Kabupaten Subang, 11. Kabupaten Bandung Barat, 12. Kabupaten Kuningan, 13. Kabupaten Majalengka, 14. Kabupaten Cirebon (AMJ 2019), 15. Kabupaten Garut (AMJ 2019), 16. Kabupaten Ciamis (AMJ 2019). (Posted by Citizen Jurnalisme, 2016)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini akan dipaparkan dan dibahas mengenai gambaran terkait format membangun opini publik terhadap partai politik melalui media massa pada Pilkada Jabar 2018, sebagai berikut:

- Isi/Substansi pokok format membangun opini publik terhadap partai politik pada

Pilkada Jabar 2018, selanjutnya berkisar tentang tema-tema maupun hal dan urusan pokok yang membumi dan sesuai jatidiri serta karakteristik Jawa Barat. Tentunya tema-tema ini diangkat melalui analisis, kajian, dan penelitian para ahli yang diadopsi KPUD Jawa Barat. Persoalan seperti kesejahteraan, kemajuan, keadilan masyarakat di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan hankam yang khas Jawa Barat, seharusnya mampu menggali kompetensi dan wawasan para calon dalam visi-misi dan program-program kebijakan mereka. Tema dan urusan untuk membangun Opini publik khas Jawa Barat yang membumi ini, dalam arti bermaslahat bagi keseimbangan material dan spiritual, berbasis budaya dan kearifan lokal serta penuh dengan keindahan dan seni bersyukur masyarakatnya. Program pro rakyat seperti ekonomi kerakyatan (home industry sesuai potensi dan keunggulan masing-masing daerah) dengan bantuan dan kredit ringan untuk mendorong masyarakat wirausaha; pendidikan dan kesehatan yang murah dan berkeadilan di seluruh pelosok wilayah, akses transportasi yang merata, layak, dan mudah; pelestarian dan pemberdayaan sumber alam dan potensi wisata daerah; program untuk penggalan, pelestarian, sosialisasi dan promosi, serta pemberdayaan nilai-nilai seni, budaya, serta kearifan lokal yang merata di semua daerah Jawa Barat. Isi dan substansi yang dikemas untuk menjadi opini public Jabar ini, sepantasnya bukan hanya bermuatan pesan-pesan dan informasi politik bagi para calon dan parpol pengusungnya, sehingga dipenuhi taktik dan trik pragmatisme politik semata, akan tetapi juga melibatkan atensi, sentimen dan kepentingan menyeluruh masyarakat Jawa Barat yang religius, berbudi luhur dan lineuwih secara etis dan budaya. Opini yang dibangun, seharusnya dimulai dari permasalahan publik yang mengundang animo serta perhatian masyarakat luas, melibatkan semua pihak dan stake-holder Jabar dalam niat tulus dan kebersamaan (duduluran),

mampu menghadirkan momentum bagi kelahiran pemimpin jabar yang amanah dan maslahat bagi semuanya. Jabar akan menyeleksi dan memilih elit utamanya, elit mana yang nantinya akan menjadi orang nomor satu di tanah pasundan dan diharapkan bukan hanya akan melanjutkan estafet pemerintahan di Jawa Barat lima tahun kedepan, akan tetapi juga mampu membawa Jawa Barat semakin maju sesuai ungkapan lokal “motekar tur nanjeur” dalam kancah perpolitikan nasional di nusantara.

- Mengenai tahapan dan periodisasi pelaksanaan format membangun opini publik terhadap partai politik pada Pilkada Jabar 2018, secara garis besar berisikan tiga (3) tahap, yaitu tahap I, II, dan III. Tahap I harus mampu menyediakan ukuran bagi public Jabar untuk melihat keterkaitan kuat antara profil, prestasi, kompetensi, dan wawasan para calon dan partai parpol pengusungnya dengan jatidiri kedaerahan serta loyalitas ke Jawa Baratan mereka; Pada Tahap II yakni menggali dan mengukur nilai dan hasil dari tahap I, apakah bisa secara logis dan argumentatif terimplementasikan nyata dan berkesinambungan melalui perencanaan program dan kebijakan yang dirancang dan ditawarkan para calon bersama parpolnya. Pada tahap akhir (III), harus dapat mengukur dan menguji kemampuan para calon sekaligus parpol pengusung ketika menampilkan nilai *potitioning* dan harkat Jawa Barat yang khas di tingkat nasional bahkan internasional.
- Dari sisi kemasan dan *setting*, format membangun opini publik terhadap partai politik pada Pilkada Jabar 2018, sebaiknya diukur dengan batasan-batasan nilai sopan-santun masyarakat, nilai etis kedaerahan serta kearifan local yang senantiasa diwariskan secara turun-temurun di tengah masyarakat pasundan yang religius. Dalam atraksi penyajian produk-produk pemberitaannya, media massa tidak perlu mengekspos para calon dan parpol pendukung mereka ketika saling mencemooh, menghina, memfitnah dan berupaya menghindari

kebohongan public serta adu argument yang miskin makna kemaslahatan. termasuk menghindari ucapan dan tindak madharat, ketika berhadapan dengan kontestan lain.

4. KESIMPULAN

Upaya untuk membangun sebuah format opini publik terhadap partai politik, yang dirancang dengan model tahapan I (substansi materi pokok opini publik), tahapan II (Periodisasi pelaksanaan opini publik), dan tahap III (kemasan dan setting opini publik) seperti ini, masyarakat pemilih Jawa Barat secara umum dapat menggali informasi dan menilai kompetensi para calon pemimpin dan parpol pengusungnya berdasarkan kriteria keunggulan kepemimpinan, serta menakar komitmen dalam tugas dan tanggungjawab mereka secara amanah dan maslahat serta menjunjung nilai-nilai luhur budaya dan kearifan lokal tatar parahyangan. Dipihak lainnya format opini publik ini juga akan terhindar dari subjektivitas dan pragmatisme politik maupun isu kebohongan publik. Dengan demikian kesalahan masyarakat dalam memilih pemimpin dan parpol pengusungnya, karena alasan para calon tidak populer atau miskin publisitas sehingga tak mampu menunjukkan kompetensi, wawasan, kemampuan diri maupun visi-misi mereka, akan dapat diminimalisasi.

Dalam konteks kehidupan demokrasi terkait Pilkada Jawa Barat 2018, komitmen dan tanggungjawab masyarakat Jawa Barat akan diuji secara sosio-politik maupun etis-normatif. Berhasilkah Jawa Barat membuktikan diri mereka selaku masyarakat yang kondusif, demokratis, partisipatif, dewasa dan berperadaban? Peristiwa politik 2018 nanti sedikit banyak akan membawa atmosfir yang melahirkan situasi-kondisi kepolitikan sangat penting dan mendidik. Sebagai misalterkait komunikasi politik akan ada terpaan informasi/pesan-pesan politik yang tidak sehat, saling curiga dan *miss understanding*, misalnya kebohongan public, *black campaign*, transaksi isu tak bertanggungjawab atau berpotensi dalam menebar fitnah dan aneka konflik mhorisontal. Menghadapi hajatan politik 2018, Jawa Barat juga akan membuktikan resistensi dan kapabilitas sistem kepolitikan di daerahnya, sebagaimana terkenal dengan situasi dan kondisi masyarakatnya yang silih asah, silih asih, dan

silih asuh. Sebuah masyarakat yang “gemah ripah wibawa mukti” dan dilandasi kepemilikan kultur santun, ramah, patuh dan toleran terhadap siapapun.

Sebagai saran, hasil dan bahasan makalah ini hendaknya menjadi pertimbangan dan bahan kajian selanjutnya bagi pihak-pihak terkait aktivitas kepolitikan di Jawa Barat, seperti partai politik maupun lembaga ELY (eksekutif, legislative, dan yudikatif). Dalam skala lebih luas, juga bagi pihak dan lembaga politik lainnya baik inpra maupun supra struktur politik nasional di NKRI. Sehingga semua pihak yang terkait dengan dinamika kepolitikan di Jawa Barat akan menyajikan dan menampilkan atraksi politik, termasuk membangun opini publik secara berbobot, penuh nilai etis budaya dan kearifan lokal. Akhirnya dengan format membangun opini public dalam ajang pesta demokratis Pilkada di atas, masyarakat Jabar akan selalu ada dalam kekeluargaan menuju Jabar yang maju dan berperadaban, insha Allah.

5. REFERENSI

Buku-buku:

- Budiardjo, Miriam, 1986. Dasar-dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia
- Cangara, Hafied, 2009. Komunikasi Politik, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Firmanzah, 2011. Mengelola Partai Politik, Jakarta: Pustaka Obor Indonesia
- Muhtadi, Asep Saeful, 2008. Komunikasi Politik Indonesia, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Nimmo, Dan, 1978. Political Communication and Public opinion in America, Santa Monica Cal.: Goodyear Publishing Company

Sumber lainnya:

- Materi Perkuliahan “Manajemen & Etika Komunikasi Politik”, semester II, MIKOM /Konsentrasi Komunikasi Politik, UNISBA, Dosen: Prof. Dr. H. Asep S. Muhtadi, M.Si. / Dr. H. Azis Taufik Hirzi, M.Si.
- Materi Perkuliahan “Kampanye dan Pemasaran Politik”, semester III, MIKOM /Konsentrasi

Komunikasi Politik, UNISBA, Dosen: Dr. H.
Azis Taufik Hirzi, M.Si.

- (ANTARA FOTO/Novrian Arbi/Dok).
Reportase
- detikNews, reportase berita
- Merdeka.com, wawancara